

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea 4, maka dari itu Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan gerakan ataupun perubahan yang dapat memajukan Bangsa Indonesia, salah satu wujudnya adalah reformasi pengelolaan keuangan negara.

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia merupakan cikal bakal peningkatan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Reformasi tersebut menerbitkan paket undang-undang keuangan negara atau biasa disebut dengan “Trisula Keuangan Negara”. Dilansir dari situs resmi psg.feb.ugm.ac.id, Tiga paket undang-undang Trisula Keuangan Negara terdiri dari UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang terkandung dalam Undang-Undang no 17 tahun 2003 atas penjelasan keuangan negara tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah menyampaikan pelaporan tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Laporan Keuangan yang harus disusun oleh pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Wulandari (2021) menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu faktor kunci atas opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah. Nilai BMN yang begitu signifikan menjadi penilaian tersendiri oleh BPK atas akuntabilitas laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengakuan, klasifikasi, pencatatan, pengukuran atau penilaian, dan penyajian aset tetap karena nilainya yang sangat krusial sehingga diharapkan dapat terhindar dari kebiasaan dan menghasilkan laporan keuangan yang terintegritas. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap memiliki definisi yaitu aset yang berbentuk nyata dan memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun

yang siap digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsi aset tetap itu sendiri, aset tetap tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis yang dinyatakan dalam paragraf 8. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tanah; (2) Peralatan dan mesin; (3) Gedung dan bangunan; (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (5) Aset tetap lainnya; dan (6) Konstruksi dalam pengerjaan.

Kota Batu merupakan salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Walaupun demikian, Kota Batu menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat pembangunan perekonomian yang tinggi khususnya di sektor pariwisata. Atas hal tersebut Kota Batu juga berupaya melakukan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memadai, sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Dikutip dari tvonenews.com, Pemerintah Kota Batu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut sejak tahun 2016. Walikota Batu juga mengatakan, ada 4 indikator yang menjadikan LKPD Pemerintah Kota Batu menerima opini WTP berturut-turut, yaitu: (1) Laporan Keuangan harus sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditentukan; (2) Kelengkapan bukti yang terintegritas; (3) Pengendalian Intern harus baik; dan (4) Penyusunan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Pemerintah Kota Batu merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun laporan keuangan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN/APBD. Atas hal tersebut Pemerintah Kota Batu wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun

anggaran sebagai pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan negara. Salah satu pos yang terdapat di dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah adalah aset tetap. Nilai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel I.1

Tabel I.1 Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Batu atas LKPD per 31 Desember 2020

Uraian	2020	2019
Aset Tetap Neto	1.581.735.002.595,30	1.566.884.827.580,62
Total Aset	1.969.750.885.908,37	2.009.936.155.097,24
Persentase Aset Tetap	80,3%	77,95%

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kota Batu (2020)

Tabel I.1 menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Batu menyajikan nilai aset tetap neto di neraca sebesar Rp1.581.735.002.595,30 atau sebesar 80,3% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Total aset neto tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,95% dari total aset tetap neto tahun anggaran 2019.

Jumlah aset tetap yang begitu signifikan dibandingkan dari pos-pos akun lainnya sering kali menjadi permasalahan yang krusial bagi pemerintah daerah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2016-2018 menunjukan beberapa temuan kesalahan. Pada tahun 2016 ditemukan kesalahan berupa pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Batu yang belum sepenuhnya memadai, tahun 2017 penatausahaan pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Batu sebesar Rp145.708.580.502,69 belum memadai, dan tahun 2018 penatausahaan dan

pencatatan aset tetap Pemerintah Kota Batu belum memadai. Meskipun demikian tahun 2016-2018 LKPD Pemerintah Kota Batu telah meraih opini WTP dari BPK.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu, dan menuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir dengan topik pembahasan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Batu, penulis telah menyusun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu?
2. Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku?
3. Apa permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batu dalam Penerapan akuntansi aset tetap?

1.3 Tujuan Penulisan

Selain untuk memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dari program studi Diploma III Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu.
2. Meninjau kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Mengetahui permasalahan dan kendala dalam penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis bermaksud untuk membatasi ruang lingkup, agar penulis dapat fokus pada topik yang akan dibahas. Fokus pembahasan karya tulis ini mengenai Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Batu, meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Adapun data yang akan digunakan menjadi dasar tinjauan ini adalah Laporan Keuangan, khususnya Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teori maupun praktik, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu, serta diharapkan menjadi sarana penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis diterima di bangku perkuliahan dan sebagai referensi dan tambahan informasi bagi pembaca.

2. Manfaat Praktik

i. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan menjadi sarana memperdalam pemahaman dalam

implementasi atas teori tentang Akuntansi Aset Tetap Pemerintah yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan sebagai sarana penulis dalam melakukan penerapan secara langsung atas teori yang diterima.

ii. Bagi Akademik

Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi di Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai pembahasan atas penerapan akuntansi aset tetap pemerintah.

iii. Bagi Pembaca

Hasil dari laporan penelitian dan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini mengenai akuntansi aset tetap pemerintah dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan pembaca dalam ranah Akuntansi Pemerintahan.

iv. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan informasi dalam penerapan akuntansi aset tetap pemerintah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan gambaran umum mengenai alasan penulis melakukan tinjauan terhadap objek berupa Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Batu. Gambaran umum tersebut mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan pemaparan atas teori dan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan karya tulis ini, teori yang akan dijelaskan meliputi definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan, pengukuran pengungkapan dan penyajian aset tetap yang berlandaskan PSAP 07. Penulis juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai salah satu landasan teori, terkait topik Akuntansi Aset Tetap pada pemerintah telah banyak di buat, sehingga pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu berada di objek dan tahun anggaran yang digunakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisikan gambaran umum terkait objek yang diangkat penulis sebagai penelitian dan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam rangka perolehan data yang memadai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan memberikan pemaparan dan penjelasan hasil penelitian berupa penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Batu.

BAB IV PENUTUPAN

Bab IV merupakan bagian penutup dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang berisikan simpulan pembahasan dari landasan teori dan fakta yang terjadi terkait masalah yang dibahas mengenai Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Batu dan saran yang diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan sehingga karya tulis ini memungkinkan untuk menjadi referensi perbaikan penerapan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Batu.